

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan pertanian dapat diartikan sebagai perubahan status sosial, bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan status dan kesejahteraan petani semata, tetapi sekaligus juga dimaksudkan untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia baik secara ekonomi, politik, sosial, budaya, lingkungan, maupun melalui perbaikan, pertumbuhan, dan perubahan (Iqbal, 2004).

Pembangunan Pertanian saat ini masih mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan daerah di Sumatera Barat, terutama terhadap peningkatan ketahanan pangan, hal ini sesuai dengan tujuan umum pembangunan pertanian yang diarahkan kepada : (1) peningkatan produksi untuk memantapkan ketersediaan pangan guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dari segi jumlah, kualitas dan harga terjangkau; (2) peningkatan pendapatan petani dengan mengembangkan sistem usaha tani yang berwawasan agribisnis agar mampu menghasilkan produk yang berkualitas, berproduktivitas tinggi dan efisien (Iqbal, 2004).

Pembangunan ketahanan pangan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil dan merata berdasarkan kemandirian, dan tidak bertentangan dengan keyakinan masyarakat. Upaya pembangunan ketahanan pangan dilakukan secara bertahap melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengenali potensi dan kemampuannya, mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah, serta mampu untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya alam secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Perwujudan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kemandirian pangan, dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan rawan pangan di pedesaan (BKP, 2012).

Salah satu diantara kebijakan yang saat ini sedang dijalankan oleh pemerintah untuk perkembangan usahatani dan terwujudnya ketahanan pangan sekaligus

mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan petani miskin adalah Program Desa Mandiri Pangan. Program ini dicanangkan oleh Dinas Pertanian dengan Badan Ketahanan Pangan sebagai dinas instansi pengelola (Dipertahor Sumbar, 2010).

Program Desa Mandiri Pangan (dalam hal ini selanjutnya disebut *Demapan*) merupakan bentuk pinjaman modal usaha untuk petani miskin. Pinjaman modal yang diberikan adalah dalam bentuk uang tunai tanpa bunga. Program yang ditujukan untuk mensejahterakan dan meningkatkan pendapatan petani miskin ini mempunyai fokus kegiatan memberdayakan petani miskin untuk meningkatkan pendapatan mereka. *Demapan* juga memberikan tenaga pendamping yang telah diseleksi dari Badan Ketahanan Pangan, tenaga pendamping ini juga disebut tenaga penyuluh dan berfungsi membantu petani di dalam pelaksanaan Program *Demapan*. Tim pendamping juga memiliki fungsi sebagai jembatan antara petani dengan instansi pengelola, jika ditemukan adanya masalah, dan juga tim pendamping juga berfungsi mengenalkan inovasi kepada petani. Program *Demapan* juga diwajibkan untuk membentuk lembaga-lembaga yang nantinya diharapkan dapat membantu dalam peningkatan kesejahteraan petani kecil, diantaranya kelompok afinitas dan Lembaga Keuangan Desa (Badan Ketahanan Pangan, 2012).

Dana pinjaman modal yang diberikan dalam *Demapan* ini digunakan oleh petani untuk mengembangkan usahatani dan meningkatkan hasil produksi mereka, sehingga dengan demikian diharapkan juga dapat meningkatkan pendapatan petani. Menurut Mosher (dalam Mubyarto, 1989) usahatani adalah himpunan dari sumber-sumber alam yang terdapat di tempat itu yang diperlukan untuk produksi pertanian tumbuh, tanah, dan air, perbaikan yang dilakukan atas tanah itu, sinar matahari, dan bangunan-bangunan yang didirikan diatasnya dan sebagainya.

B. Perumusan Masalah

Program *Demapan* dilakukan di berbagai Provinsi di Indonesia, salah satunya di Provinsi Sumatera Barat. Program *Demapan* di Sumatera Barat dilaksanakan di

delapan Kabupaten antara lain Kabupaten Limapuluh Kota, Kabupaten Agam, Kabupaten Solok, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Solok Selatan. Dari ketujuh kabupaten tersebut, Kabupaten Pasaman yang lebih mengedepankan usahatani pertanian pangan (padi sawah) dalam melaksanakan *Demapan* selain usaha ternak (kambing) dan hortikultura (cabe), sedangkan Kabupaten lainnya melaksanakan program *Demapan* pada usaha perdagangan, perikanan, dan usaha lainnya (Lampiran 1).

Pelaksanaan *Demapan* di Kabupaten Pasaman dimulai awal 2011, dan telah selesai dilaksanakan di empat Kecamatan yaitu Kecamatan Panti, Padang Gelugur, Duo Koto, dan Rao Utara. Penetapan keempat Kecamatan berdasarkan jumlah KK miskin besar dari 30% serta berpotensi di bidang pertanian di daerah mereka (Haluan, 2012).

Dalam pelaksanaannya, program *Demapan* ini memiliki kelompok afinitas, yaitu kelompok yang sengaja dibentuk bagi pelaksanaan program *Demapan*. Program *Demapan* membentuk kelompok afinitas dari kelompok yang telah ada di kenagarian Simpang Tonang, yang beranggotakan petani-petani miskin yang dipilih oleh Badan Ketahanan Pangan sebagai kelompok afinitas program *Demapan* (dalam hal ini selanjutnya disebut kelompok Karya Makmur Sejati).

Salah satu syarat mutlak bagi usahatani agar dapat berjalan optimal adalah ketersediaan modal yang cukup. Selama ini petani memanfaatkan lembaga-lembaga permodalan yang ada untuk mendapatkan modal usahatani mereka. Pada kenyataannya beberapa diantara lembaga permodalan tersebut bersifat eksploitatif terhadap usaha para petani. Misalnya tingkat suku bunga pinjaman yang tinggi, dan keharusan pihak petani menjual hasil panen kepada pihak yang memberikan pinjaman, sehingga pendapatan petani menurun dan bahkan terjerat hutang yang sulit untuk dibayar (Mubyarto, 1994). *Demapan* memberikan bantuan pinjaman tanpa bunga sebesar 100 juta tiap Kabupaten/Kota, dari dana tersebut akan dibagi dan diberikan kepada petani dengan jumlah bantuan 2,5 juta tiap individu petani, sehingga diharapkan pendapatan petani dari hasil usahatani dapat meningkat. Bantuan yang

diberikan kepada petani sebesar 2,5 juta akan dikelola oleh petani sendiri dalam usahatani mereka, sedangkan dana yang berlebih dari keseluruhan jumlah dana (100 juta) akan dikelola oleh Lembaga Keuangan Desa. Dengan pinjaman tanpa bunga tersebut semestinya dapat membantu petani kelompok Karya Makmur Sejati dalam meningkatkan penggunaan input-input variable, dengan pengadaan bibit dan benih, pupuk yang dipakai, pestisida, serta jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam usahatani. Ini mestinya dapat membantu meningkatkan hasil produksi dan pendapatan usahatani. *Demapan* juga memberikan bantuan lainnya yaitu tenaga pendamping bagi petani dalam usahatani mereka. Tenaga pendamping ini bertugas mendampingi petani dalam menggunakan teknologi baru bagi usahatani, serta mencari jalan keluar bagi permasalahan di dalam usahatani.

Namun demikian, uraian di atas masih bersifat hipotesis. Dari penjelasan uraian tersebut, timbul pertanyaan peneliti, Apakah Program *Demapan* Berpengaruh Terhadap Tingkat Produktifitas, Penggunaan Input Variabel, Pendapatan, dan Keuntungan Usahatani Padi Sawah Peserta Program?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan pendekatan Analisis Perbandingan Antara Usahatani Peserta Program *Demapan* dan Usahatani *non Demapan*.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak program *Demapan* terhadap usahatani melalui analisis perbandingan hasil kinerja usahatani *Demapan* dan *non Demapan* dengan menganalisis tingkat produktifitas, tingkat penggunaan input variabel, penerimaan, pendapatan, serta keuntungan usahatani dalam usahatani *Demapan* dan *non Demapan*.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diberikan dari penelitian ini adalah bagi pemerintah setempat dapat dijadikan bahan penunjang pemahaman usahatani yang dilaksanakan

dalam suatu Program. Bagi petani diharapkan dapat dijadikan bahan dan salah satu acuan agar petani setempat dapat lebih mandiri dan ke depannya tidak lagi bergantung kepada bantuan pemerintah atau Dinas Pertanian. Bagi mahasiswa, untuk mengetahui dan mempelajari bagaimana pelaksanaan dan hasil dari usahatani, langkah-langkah dan strategi agar usahatani dapat terlaksana dengan baik dan dapat meningkatkan pendapatan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan Pertanian

Pembangunan pertanian dapat didefinisikan sebagai suatu proses perubahan sosial. Implementasinya tidak hanya untuk meningkatkan status dan kesejahteraan petani semata, tetapi juga dimaksudkan untuk meningkatkan potensi sumber daya manusia baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya, lingkungan, maupun perbaikan, pertumbuhan dan perubahan (Iqbal, 2008).

Syarat pokok pembangunan pertanian meliputi : (1) adanya pasar untuk hasil-hasil usahatani, (2) teknologi yang senantiasa berkembang, (3) tersedianya alat dan bahan produksi secara lokal, (4) adanya peransang produksi bagi petani, (5) tersedianya pengangkutan secara lancar. Di banyak Negara, sektor pertanian yang berhasil merupakan prasyarat bagi pembangunan sektor industri dan jasa. Pada tahap pertama, pembangunan dititikberatkan pada pembangunan sektor pertanian dan sektor industri penghasil sarana pertanian. Pada tahap kedua, pembangunan dititikberatkan pada industri pengolahan penunjang pertanian atau agroindustri yang selanjutnya secara bertahap dialihkan pada pembangunan industri mesin dan logam. Rancangan pembangunan yang demikian diharapkan dapat membentuk struktur perekonomian